

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : DD Tahap Dua Belum cair

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung

Sumber / Hal : Galamedia / Hal.5

Edisi : Selasa, 31 Juli 2018

DD Tahap Dua Belum Cair

■ Menghambat Proses Pembangunan Tingkat Desa

ARJASARI, (GM).-

Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Bandung, mengeluhkan belum cairnya dana desa (DD) tahap dua. Akibatnya, proses pembangunan yang tengah berjalan di tingkat desa berjalan lambat dan terhambat.

Kades Arjasari, Rosiman mengatakan, tahun ini pencairan dana desa dilakukan tiga tahap. Pada tahap pertama pencairan sudah selesai, sedangkan tahap kedua ini sejak April sampai Juli belum dicairkan.

"Salah satu permasalahan yang sering terjadi menyangkut pencairan dana desa, yaitu soal waktu pelaporan pertanggungjawaban. Pelaporan dana desa harus disampaikan pada 15 Desember, sementara pelaksanaan pembangunan harus tuntas sebelum tanggal tersebut," kata Rosiman di kantornya, Senin (30/7).

Rosiman menuturkan, pencairan dana desa pada tahap pertama selanjutnya akan turun pada Januari. Namun dalam Peraturan Bupati Bandung tentang Dana Desa, disebutkan bahwa bantuan tersebut ditransfer ke desa pada akhir Februari.

Ditambahkan, saat ini desa lebih disibukkan mengurus laporan pertanggungjawaban dibandingkan pembangunan wilayah. Tapi pencairan dana desa yang sering terlambat, menjadi hambatan bagi desa. "Dana desa sebaiknya jangan diatur oleh peraturan bupati. Begitu pula surat keputusan (SK) bersama tiga menteri harus dievaluasi, agar DD mengalir ke desa lebih cepat sehingga terjadi percepatan pembangunan," ujarnya.

Kades Cilame, Alo Sobirin menambahkan, keterlambatan pencairan dana desa di Kab. Bandung sudah menjadi budaya. "Pencairan tahap pertama lambat, dan sudah menjadi budaya. Tahap selanjutnya, dana desa cair tergantung dari cepat atau tidaknya desa melaporkan pertanggungjawaban, serta mengajukan permohonan pencairan tahap berikutnya," papar Alo.

Dijelaskan, berdasarkan PMK No. 225/-PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, disebutkan bahwa pencairan DD 2018 menjadi tiga tahap yaitu Januari, Maret, dan Juli.

Belum ada permohonan

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Kab. Bandung, Tata Irawan Sobandi mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah menyalurkan DD tahap kedua ke 90 desa dari total 270 desa.

"Tahap satu sudah selesai, sedangkan tahap kedua baru sekitar 90 desa yang mencairkan.

Sejauh ini, tidak ada kendala dalam pencairan. Terkait keluhan desa-desa yang selalu menerima DD tidak tepat waktu, kami menunggu pemdes datang mengurus DD dengan persyaratan," terang Tata.

Tata memperkirakan, DD yang belum cair karena desa belum mengajukan permohonan pencairan. Pihaknya pun tidak mengetahui detail tentang alasan desa belum mengajukan permohonan pencairan. "Kalau soal belum mengajukan permohonan dan melengkapi syarat pencairan, silahkan ditanya ke desa," ucapnya.

Membingungkan

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag. menyatakan, pengguliran anggaran DD menuai keluhan dari aparat pemerintahan desa terkait petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengelolaannya.

"Kondisi itu membuat kades bingung. Misal-

nya dalam pengerjaan satu paket infrastruktur jalan sepanjang 100 meter dengan anggaran Rp 300 juta, dalam pengerjaannya dihitung hari orang kerja (HOK) dan administrasi pelaporan pengerjaan sehingga harus ada biaya pelaporan dan dana teknis lainnya. Memang itu sah-sah saja, tapi membingungkan," beber Cucun saat reses di Desa Pangauban, Kec. Pacet, kemarin.

Cucun berharap, untuk operasional pengerjaan pembangunan infrastruktur tersebut bisa diambil 10 persen dari besaran anggaran. Hal itu bisa diprotek, supaya tidak terjadi penyelewengan anggaran.

Berkaitan dengan permasalahan itu, Cucun akan menyikapinya dengan mengusulkannya ke pemerintahan terkait di tingkat pemerintahan pusat untuk membahas kembali juklak dan juknis pengelolaan dana desa. "Menyikapi kebutuhan dan keluhan pemerintahan desa, kami pun berharap anggaran dana desa ditingkatkan 10 persen," ujarnya. (B.122/B.105)**